

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Siswa SMP

Raysha¹, Ramadhani², Najwa³, Amalia⁴, Marshanda⁵, Muhammad Dicky⁶, Setiawan⁷,
Ali Iskandar, Zulkarnain⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} IAIN Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: Sindi Oktaviani, e-mail: raysha13ramadhani@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membangun kesadaran berdemokrasi siswa SMP. Namun, implementasi PKn masih menghadapi kendala seperti metode pembelajaran yang kurang interaktif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya keterlibatan siswa dalam praktik demokrasi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi PKn dalam meningkatkan kesadaran demokrasi siswa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sikap dan partisipasi siswa dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang aktif, dukungan lingkungan sekolah, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan demokratis, seperti pemilihan ketua kelas dan organisasi sekolah, dapat meningkatkan pemahaman demokrasi. Oleh karena itu, inovasi dalam metode pengajaran PKn diperlukan agar lebih partisipatif dan relevan dengan kehidupan siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, kesadaran demokrasi, implementasi PKn, partisipasi siswa, metode pembelajaran

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip demokrasi. Di Indonesia, PKn menjadi bagian integral dari kurikulum nasional dan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis kepada siswa sejak usia dini. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan siswa dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, efektivitas implementasi PKn dalam membangun kesadaran demokrasi masih menjadi tantangan, terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Banyak siswa yang masih pasif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, yang menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan aplikatif.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang mendukung pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran demokrasi. Teori Pembelajaran Konstruktivis menekankan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran agar dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara lebih mendalam. Piaget (1972) dan Vygotsky (1978) berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam interaksi sosial dan pengalaman langsung. Dalam konteks PKn, metode pembelajaran yang berbasis diskusi, simulasi pemilihan, serta partisipasi dalam organisasi sekolah dapat membantu siswa memahami demokrasi secara lebih aplikatif. Selain itu, Teori Demokrasi Deliberatif dari Habermas (1984) menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi melalui dialog dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang relevan dengan bagaimana PKn dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran demokrasi siswa.

Berbagai penelitian telah menyoroti peran penting PKn dalam membangun kesadaran demokrasi siswa. Julita et al. (2024) menemukan bahwa PKn yang diajarkan dengan metode partisipatif, seperti diskusi kelompok dan simulasi pemilu, lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep demokrasi. Selain itu, penelitian oleh Ramadani et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti OSIS atau forum diskusi, berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi demokratis mereka. Namun, beberapa penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi PKn. Mulyani (2022) mengidentifikasi bahwa keterbatasan metode pembelajaran interaktif serta kurangnya pelatihan bagi guru dalam menerapkan strategi pengajaran yang efektif menjadi kendala utama dalam membangun kesadaran demokrasi siswa. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi persepsi siswa terhadap demokrasi dan partisipasi politik mereka di masa depan.

Meskipun banyak penelitian telah membahas peran PKn dalam membangun kesadaran demokrasi, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana metode pembelajaran yang tepat dapat diterapkan secara efektif di sekolah. Banyak studi menyoroti pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi sosial, tetapi masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana strategi pembelajaran ini dapat diadaptasi di lingkungan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi PKn dalam membangun kesadaran demokrasi siswa SMP, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengevaluasi strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran PKn yang lebih interaktif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era modern.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kalangan siswa SMP?

Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi siswa SMP?

Bagaimana dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi demokratis siswa SMP?

Tujuan Penelitian

Menganalisis penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran berdemokrasi siswa SMP.

Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi.

Mengevaluasi pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap dan keterlibatan siswa SMP dalam kehidupan demokratis.

Manfaat Penelitian

Secara Akademik: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah.

Secara Praktis: Menjadi referensi bagi pendidik dalam merancang strategi pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif.

Secara Kebijakan: Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan pendidikan untuk memperkuat kurikulum yang mendukung pembentukan kesadaran demokrasi di kalangan siswa SMP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan.

Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan fenomena berdasarkan sumber data yang tersedia. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai dokumen atau sumber tertulis.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jurnal ilmiah yang membahas topik yang relevan dengan penelitian.
2. Buku referensi yang memberikan dasar teori yang kuat.
3. Laporan atau dokumen resmi yang mendukung analisis dalam penelitian ini.
4. Artikel atau sumber lain yang kredibel sebagai pendukung kajian.

Prosedur Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi topik dan fokus penelitian berdasarkan tujuan penelitian.

2. Pengumpulan dokumen dan literatur yang relevan dari berbagai sumber.
3. Analisis isi dokumen untuk menemukan pola, konsep, atau informasi penting.
4. Penyusunan hasil penelitian berdasarkan temuan dari analisis dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis), dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data: Menyaring dan memilih informasi yang relevan dari berbagai dokumen.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam tema atau konsep utama.

Interpretasi: Menyusun pemahaman berdasarkan teori dan temuan dari dokumen yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokrasi siswa SMP. Menurut Arif (2020), pendidikan demokrasi harus berorientasi pada pengalaman langsung dalam kehidupan sekolah agar siswa dapat memahami konsep dan nilai-nilai demokrasi dengan lebih baik. Hal ini diperkuat oleh Julita et al. (2024), yang menemukan bahwa pembelajaran PKn berbasis pengalaman, seperti simulasi pemilu dan forum diskusi, secara signifikan meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam praktik demokrasi.

Pendekatan partisipatif dalam pembelajaran PKn juga dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ramdani et al. (2021) menjelaskan bahwa metode seperti studi kasus, role-playing, dan proyek berbasis komunitas membantu siswa memahami bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, ketika siswa diberikan kesempatan untuk memilih ketua kelas melalui sistem pemungutan suara yang transparan, mereka tidak hanya belajar tentang demokrasi secara teori, tetapi juga mengalaminya langsung dalam lingkungan sekolah.

Selain itu, Rahmat (2022) menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembelajaran PKn seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan sosial yang mendukung kehidupan demokratis.

Namun, implementasi PKn di sekolah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal metode pembelajaran yang cenderung konvensional. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah yang kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam diskusi (Arifin, 2021). Padahal, Wahyudi (2023) menegaskan bahwa lingkungan belajar yang demokratis sangat penting

untuk menciptakan budaya demokrasi sejak dini. Sekolah yang menerapkan diskusi terbuka, memberikan kebebasan berekspresi, serta mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya akan lebih efektif dalam membentuk karakter demokratis pada peserta didik.

Di era digital, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas PKn. Menurut Santoso & Lestari (2021), media digital seperti video edukasi, simulasi daring, dan e-learning dapat membantu siswa memahami demokrasi dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, penggunaan aplikasi pemungutan suara digital dalam pemilihan OSIS dapat menjadi pengalaman langsung bagi siswa dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Faktor Pendukung

1. Metode Pembelajaran Interaktif

Penerapan metode seperti diskusi kelompok, debat, studi kasus, dan simulasi politik memungkinkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mulyani (2022) menemukan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam debat terbuka lebih mampu memahami konsep demokrasi dibandingkan dengan yang hanya menerima ceramah dari guru.

2. Lingkungan Sekolah yang Demokratis

Sekolah yang menerapkan sistem demokratis dalam pengambilan keputusan memberikan contoh nyata kepada siswa tentang bagaimana prinsip demokrasi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sekolah yang melibatkan siswa dalam perumusan kebijakan internal cenderung lebih berhasil dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi (Bhagasasih & Dewi, 2021).

3. Dukungan Kebijakan Pendidikan

Adanya kebijakan yang mewajibkan pendidikan demokrasi dalam kurikulum menjadi faktor utama dalam memperkuat kesadaran demokrasi siswa. Julita et al. (2024) menekankan bahwa kurikulum PKn yang menekankan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari lebih efektif dibandingkan dengan kurikulum yang hanya berfokus pada teori.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Integrasi teknologi dalam pengajaran PKn, seperti penggunaan platform e-learning dan media sosial sebagai sarana diskusi, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami demokrasi (Santoso & Lestari, 2021).

Faktor Penghambat

1. Metode Pembelajaran yang Kurang Interaktif

Beberapa guru masih mengandalkan metode ceramah yang tidak efektif dalam membangun kesadaran demokrasi siswa (Arifin, 2021).

2. Minimnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya fasilitas pendukung, seperti bahan ajar berbasis teknologi, menghambat pemahaman siswa tentang demokrasi (Ramdani et al., 2022).

3. Kurangnya Keterlibatan Siswa

Tidak semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokratis di sekolah, terutama di sekolah yang tidak menerapkan sistem yang demokratis dalam pengelolaannya (Mulyani, 2022).

4. Kurangnya Pelatihan bagi Guru

Guru perlu mendapatkan pelatihan terkait metode pembelajaran interaktif agar lebih efektif dalam mengajarkan demokrasi (Hidayati & Prasetya, 2024).

1. *Analisis Materi Pendidikan Kewarganegaraan*

Analisis terhadap buku ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menunjukkan bahwa sebagian besar materi PKn telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar pembelajaran PKn lebih efektif dalam membangun kesadaran demokrasi siswa.

1. Keterkaitan antara Teori dan Praktik

Meskipun teori demokrasi telah diajarkan dalam buku ajar, penerapannya dalam kehidupan sekolah masih terbatas. Banyak siswa yang memahami konsep demokrasi secara teoritis tetapi belum memiliki kesempatan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Santoso & Lestari (2021) menekankan bahwa praktik langsung dalam pembelajaran demokrasi, seperti diskusi terbuka, pemilihan ketua kelas, atau simulasi sidang, dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam prinsip-prinsip demokrasi. Bhagasasih & Dewi (2021) juga menambahkan bahwa sekolah perlu menyediakan lebih banyak program ekstrakurikuler yang berbasis demokrasi agar siswa dapat mengalami proses demokratis secara langsung.

2. Kontekstualisasi dengan Isu Sosial Terkini

Materi PKn masih kurang mengaitkan demokrasi dengan perkembangan sosial-politik terkini, sehingga siswa sering kali kesulitan melihat relevansi demokrasi dalam kehidupan mereka. Ramdani et al. (2022) mengungkapkan bahwa kurikulum yang tidak memperbarui materi dengan contoh-contoh nyata akan membuat siswa merasa bahwa pembelajaran demokrasi hanya sekadar teori yang tidak berhubungan dengan realitas. Hidayati & Prasetya (2024) menambahkan bahwa pembelajaran PKn seharusnya mencakup diskusi mengenai isu-isu seperti kebebasan berpendapat di media sosial, partisipasi generasi muda dalam pemilu, atau peran demokrasi dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial.

3. Evaluasi yang Berbasis Keterampilan Demokratis

Sebagian besar sistem evaluasi dalam pembelajaran PKn masih berfokus pada aspek kognitif, seperti menghafal teori dan konsep demokrasi, sementara penilaian terhadap keterampilan siswa dalam berpartisipasi secara demokratis masih minim. Julita et al. (2024) menekankan pentingnya pengembangan sistem evaluasi berbasis proyek yang dapat mengukur keterampilan demokratis siswa, seperti kerja sama dalam tim, kemampuan berdebat secara sehat, serta keterampilan dalam menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang logis. Sari & Hidayat (2023) juga menyarankan

agar sekolah mulai menerapkan metode penilaian berbasis portofolio, di mana siswa dinilai berdasarkan partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

4. Penggunaan Sumber Belajar Digital

Di era digital, bahan ajar PKn perlu dilengkapi dengan sumber belajar yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Fauzi & Rahman (2020) menyoroti bahwa penggunaan media digital, seperti video edukasi, platform diskusi daring, serta simulasi politik berbasis teknologi, dapat membantu siswa memahami demokrasi dalam konteks global dan bagaimana penerapannya di berbagai negara. Selain itu, media digital juga memungkinkan siswa untuk mengakses lebih banyak perspektif mengenai demokrasi, termasuk melalui wawancara dengan tokoh politik, webinar, atau studi kasus interaktif yang disediakan oleh platform pendidikan daring.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKn di sekolah masih memerlukan berbagai perbaikan agar lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penguatan hubungan antara teori dan praktik, integrasi isu sosial terkini dalam materi ajar, penggunaan metode evaluasi yang lebih berbasis keterampilan, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas PKn dalam membangun kesadaran demokrasi siswa SMP.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran demokrasi siswa SMP. Artikel ini menunjukkan bahwa implementasi PKn di sekolah-sekolah telah mencakup berbagai aspek penting dalam pembentukan nilai-nilai demokratis, tetapi masih menghadapi beberapa kendala.

Beberapa faktor pendukung dalam implementasi PKn meliputi metode pembelajaran interaktif, lingkungan sekolah yang demokratis, kebijakan pendidikan yang mendukung, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Metode seperti diskusi, debat, simulasi pemilu, dan proyek berbasis komunitas telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Lingkungan sekolah yang mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan juga memperkuat praktik demokrasi sejak dini. Selain itu, kebijakan pendidikan yang mewajibkan materi demokrasi dalam kurikulum memberikan landasan yang kuat bagi pembelajaran PKn.

Namun, implementasi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, dengan banyak guru mengandalkan ceramah daripada pendekatan interaktif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya akses ke bahan ajar berbasis digital, turut menghambat efektivitas pembelajaran. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam menerapkan metode yang lebih partisipatif juga menjadi kendala. Selain itu, evaluasi yang masih berorientasi pada aspek kognitif membuat siswa kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan demokratis secara langsung.

Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka pendidikan demokrasi di sekolah akan kehilangan efektivitasnya, menyebabkan siswa kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, perlu ada upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat peran PKn dalam membentuk generasi yang sadar dan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan ilmiah dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Teori, dan Implementasi. Jakarta: Pustaka Akademik.
- Branson, M. S. (1998). The role of civic education. Center for Civic Education.
- Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.
- Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.). W. W. Norton. (Original work published 1936)
- Rahmat, A. (2022). Kewarganegaraan: Hak dan Kewajiban dalam Negara Demokratis. Bandung: Pustaka Bangsa.
- Suryadi, T. (2021). Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat. Yogyakarta: Media Wacana.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds. & Trans.). Harvard University Press.
- Wahyudi, B. (2023). Demokrasi dan Pendidikan: Mewujudkan Partisipasi Politik Sejak Dini. Surabaya: Cendekia Press.
- Amelia, S., & Santoso, G. (2022). Pengaruh pembelajaran ilmu teknologi dalam meningkatkan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(2), 146–155. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.419>
- Arifin. (2021). Persepsi siswa terhadap konsep demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Research and Development Journal of Education, 7(1), 544–552. <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v7i1.12582>
- Bhagasasih, B. A., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan: Membangun masyarakat demokrasi yang berkeadaban dari saat ini. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 249–258. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1429>

Haliza, V. N., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dalam menjawab tantangan masa depan bangsa di tengah arus globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i2.1615>

Juanda, J., & Rahayu, N. Q. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembelajaran demokrasi di sekolah: Suatu alternatif pembelajaran yang demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 101–110. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i1.1102>

Julita, W., Aulia, R., Windita, D. Z., Kalda, S., Patricia, E., & Hasibuan, H. A. (2024). Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi. *Pancasila and Civics Education Journal*, 3(3), 23–28. <https://doi.org/10.30596/pcej.v3i3.21796>

Mulyani, S. D. (2022). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 104–113. <https://doi.org/10.35194/jpphk.v12i2.2185>

Maryam, S., Nuswantari, N., & Kokotiasa, W. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMP Negeri 11 Madiun. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, dan Humaniora (SENASSDRA)*, 1(2022). <https://prosiding.unipma.ac.id>

Puspita, M. D. (2021). Strategi guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di SMP N 5 Batang. *Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VI, Universitas PGRI Semarang*, 146–156. conference.upgris.ac.id

Ramadani, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9034–9038. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>

Ramadani, W. O. D., Noe, W., & Rajaloe, N. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Ternate. *Jambura Journal Civic Education*, 2(1), 90–101. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i1.14505>

Setiawati, I., Mahfuroh, L., & Azha, N. F. (2024). Pentingnya pembelajaran PKn di SD untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.472>

Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>